

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Pendidikan sebagai salah satu bagian terpenting dalam proses pembangunan nasional merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai suatu investasi dalam pengembangan sumberdaya manusia. Fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan yang diinginkan dari pendidikan nasional tersebut jelas berkenaan dengan pembentukan akhlak manusia yang lebih baik dengan berbagai karakteristiknya. Agar tujuan pendidikan nasional tercapai maka pendidikan harus dikenyam oleh setiap orang. Hal ini dinyatakan dalam Bab V pasal 5 ayat 1 yang

berbunyi bahwa “Setiap warga Negara Mempunyai hak sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Pasal 11 ayat 1 lebih menegaskan kepada hal siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan yang idealnya dapat dinikmati oleh seluruh warga negara. Pasal tersebut berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif.”

Pasal tersebut jelas menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara. Pasal tersebut juga mengandung arti bahwa pendidikan itu bertujuan memberikan peluang yang sama kepada seluruh warga negaranya untuk bersama-sama belajar, menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan tingkat usianya.

Untuk memperoleh pendidikan yang baik dan bermutu, banyak hal yang harus dipersiapkan agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu sarana untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu adalah perihal yang berkenaan pembiayaan. Pendidikan yang bermutu dan perluasan kesempatan belajar akan dapat dicapai antara lain, apabila tersedia dana yang mencukupi. Untuk menyediakan berbagai sumber dan fasilitas yang dibutuhkan, sehubungan dengan mutu yang diharapkan, tentu biayanya tidak murah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu membutuhkan dana yang besar dan menuntut pelaksanaan pengelolaan yang baik, efektif dan transparan.

Dalam upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang bermutu tersebut, biaya merupakan komponen yang sangat penting, malah dapat dikatakan, bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh (Dedi Supriadi 2003 : 3) yang mengatakan bahwa:

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan.

Berkaitan dengan biaya, (Zymelman: 1975) dalam Pengelolaan Pendidikan mengemukakan bahwa:

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana itu secara efisien. Makin efisien suatu system pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Oleh karena itu, dengan pengelolaan biaya secara baik akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevansi antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan masyarakat.

Setiap biaya pendidikan yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di sekolah dituntut tanggung jawab rasional dan moral. Tanggung jawab rasional ialah tanggung jawab yang diberikan secara administratif. Dan secara moral adalah sejauh mana dana yang digunakan itu dimanfaatkan untuk kepentingan perkembangan peserta didik selama mengikuti pelajaran di sekolah. Dengan demikian program-program yang ditujukan untuk menciptakan iklim proses belajar mengajar yang kondusif sehingga menumbuhkan

rasa percaya diri, perilaku inovatif dan produktif serta merangsang peserta didik aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran perlu mendapat perhatian utama.

Biaya pendidikan merupakan faktor yang turut menentukan mutu pendidikan dan mutu lulusan. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh R.L. Johns, E.L. Morphet, K. Alexander, yang dikutip oleh Nanang Fattah (2000:108) berbunyi bahwa:

Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan, dan tenaga pendidik yang kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar.

Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, maka kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Dalam rangka penuntasan Wajardikdas 9 tahun yang bermutu, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan Wajardikdas 9 tahun yang bermutu adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk

pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Melalui program BOS yang terkait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka setiap pelaksana program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

- BOS harus menjadi sasaran penting untuk mempercepat penuntasan Wajardikdas 9 tahun.
- Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.
- Anak lulusan setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan tingkat pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/MI/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB dengan alasan mahalny biaya masuk sekolah.
- Kepala sekolah/madrasah/ponpes mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/MTs/SMPLB. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun.

Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Selain itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah (suplemen) juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah/madrasah/ponpes dihitung mulai Januari 2009 berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SD yang berada di Kota sebesar Rp 400.000,00/siswa/tahun.
- SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SD yang berada di Kabupaten sebesar Rp 397.000,00/siswa/tahun.
- SMP/MTs/SMPLB/SMPT/Salafiyah/sekolah agama non Islam setara SMP yang berada di Kota sebesar Rp 575.000,00/siswa/tahun.
- SMP/MTs/SMPLB/SMPT/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SMP yang berada di Kabupaten sebesar Rp 570.000,00/siswa/tahun.

Selain ditentukan oleh pembiayaan salah satunya yang berasal dari BOS, agar pembelajaran berjalan efektif ditentukan juga oleh kinerja guru yang efektif. Kinerja guru yang efektif adalah guru yang mampu membawa siswanya dengan berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Mengajar di depan kelas merupakan perwujudan interaksi dalam proses komunikasi.

Berkaitan dengan kinerja guru, J.J. Hasibuan (1986 : 41-42) menjelaskan bahwa:

Guru sebagai pemegang kunci (key person) sangat menentukan proses keberhasilan siswa. Sebagai *key person* guru harus melaksanakan perilaku-perilaku mengenali: (1) kejelasan menyampaikan informasi secara verbal maupun non verbal, (2) kemampuan guru dalam membuat variasi tugas dan tingkah lakunya, (3) sifat hangat dan antusias guru dalam berkomunikasi, (4) perilaku guru yang berorientasi pada tugasnya saja tanpa merancukan dengan hal-hal yang bukan merupakan tugas keguruannya, (5) kesalahan guru dalam menggunakan gagasan-gagasan yang dikemukakan siswa dan pengarahan umum secara tidak langsung, (6) perilaku guru yang berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada siswanya dalam mempelajari tugas yang ditentukan, (7) perilaku guru dalam memberikan komentar-komentar yang terstruktur, (8) perilaku guru yang menghindari kritik yang bersifat negatif terhadap siswa, (9) perilaku guru dalam membuat variasi keterampilan bertanya, (10) kemampuan guru dalam menentukan tingkat kesulitan pengajarannya, dan (11) kemampuan guru mengalokasikan waktu mengajarnya sesuai dengan alokasi waktu-waktu dalam perencanaan satuan pelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, konsep kompetensi kinerja guru yang profesional dapat diartikan sebagai kemampuan dasar melaksanakan tugas keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan *merencanakan* program belajar mengajar, kemampuan *melaksanakan* atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan *menilai* atau mengevaluasi proses belajar mengajar.

Kemampuan merencanakan dalam T. Raka Joni (1984: 12) mengemukakan bahwa:

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar mencakup kemampuan(1) merencanakan pengorganisasian bahan-bahan pengajaran, (2) merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, (3) merencanakan pengelolaan kelas, (4) merencanakan penggunaan media dan sumber pengajaran, dan (5) merencanakan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran.

Berdasarkan uraian di atas, merencanakan program belajar mengajar merupakan proyeksi kinerja guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yang mencakup: merumuskan tujuan,

mendesripsikan satuan pokok bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih berbagai media dan sumber belajar yang paling relevan, dan merencanakan penilaian terhadap penguasaan tujuan pembelajaran.

Sedangkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar menyangkut pengelolaan pembelajaran, dalam menyampaikan materi pelajaran harus dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga tujuan pengajaran dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar terlihat dalam mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa, kemudian mendiagnosis, menilai dan merespon setiap perubahan perilaku siswa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melaksanakan proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan dimana berlangsung hubungan antara manusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan menolong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pada dasarnya melaksanakan proses belajar mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yang dapat menimbulkan perubahan struktur kognitif para siswa.

Setelah proses pelaksanaan, guru harus melakukan penilaian proses belajar mengajar untuk mengetahui keberhasilan perencanaan kegiatan belajar mengajar yang telah disusun dan dilaksanakan. Penilaian diartikan sebagai proses yang menentukan betapa baik organisasi program atau kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud-maksud yang telah ditetapkan. Selanjutnya Joint Commite dalam Wirawan (2002:22), menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari setiap upaya manusia, evaluasi yang baik akan

menyebarkan pemahaman dan perbaikan pendidikan, sedangkan evaluasi yang salah akan merugikan pendidikan. Tujuan utama melaksanakan evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh siswa, sehingga tindak lanjut hasil belajar akan dapat diupayakan dan dilaksanakan. Dengan demikian, melaksanakan penilaian proses belajar mengajar merupakan bagian tugas guru yang harus dilaksanakan setelah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat diupayakan tindak lanjut hasil belajar siswa.

Kompetensi kinerja guru yang profesional dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu kompetensi *substantif* dan *non substantif*. Kompetensi substantif diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas keguruan yang dapat dilihat dari kemampuan *merencanakan* program belajar mengajar, mengelola dan *melaksanakan* proses belajar mengajar, dan melakukan *evaluasi* hasil proses belajar mengajar. Kompetensi non substantif diartikan sebagai kemampuan dalam hal landasan dan wawasan pendidikan, serta kepribadian, profesi dan pengembangan dari guru yang bersangkutan. Kompetensi profesional guru sangat diperlukan guna mengembangkan kualitas dan aktivitas tenaga kependidikan dalam hal ini guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu mutu pendidikan dan keberhasilan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, tingkat kompetensi profesional guru di suatu sekolah dapat dijadikan barometer bagi mutu dan keberhasilan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kontribusi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka yang dibiayai oleh dana BOS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya dalam latar belakang penelitian, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah *“Seberapa besar kontribusi Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kinerja Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?”* Dengan rumusan masalah tersebut maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi tentang manajemen BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana deskripsi tentang kinerja mengajar guru di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
3. Bagaimana deskripsi tentang efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
4. Seberapa besar kontribusi manajemen BOS terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka ?

5. Seberapa besar kontribusi kinerja mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
6. Seberapa besar kontribusi Manajemen BOS terhadap kinerja mengajar guru di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?
7. Seberapa besar kontribusi Manajemen BOS dan kinerja mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa besar kontribusi manajemen BOS dan kinerja mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka?

Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang manajemen BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kinerja mengajar guru di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kontribusi manajemen BOS terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

5. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kontribusi kinerja mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
6. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kontribusi manajemen BOS terhadap kinerja mengajar guru di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
7. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kontribusi manajemen BOS dan kinerja mengajar guru terhadap efektivitas pembelajaran di SMP Negeri se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis manfaat penelitian ini yaitu, memperdalam kajian tentang manajemen pendidikan, pembiayaan pendidikan baik sebagai penguatan penerapan konsep maupun praktek sebagai stimulus pengembangan kualitas layanan pendidikan dalam bidang administrasi pendidikan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi yang berminat untuk mendalami lebih jauh tentang manajemen pembiayaan pendidikan terutama terhadap terlaksananya efektivitas pembelajaran di Sekolah Dasar.
2. Sebagai bahan masukan kepada pihak penentu kebijakan berkenaan dengan pembiayaan pendidikan di tingkat pendidikan dasar.
3. Sebagai guna laksana, dimana hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan bagi pengelola pendidikan di Sekolah Menengah Pertama untuk lebih

mendayagunakan biaya pendidikan secara efektif dan efisien dalam upaya peningkatan mutu layanan pembelajaran terhadap siswa.

E. Kerangka Pemikiran

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar proses pendidikan dimana biaya perlu manajemen yang tepat dan efektivitas pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor manajerial atau pengelolaan pembiayaan dalam peningkatan efektivitas pembelajaran sehingga peningkatan mutu lulusan.

Menurut Nanang Fattah (2000:108), mutu pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses belajar mengajar. Kemampuan pengelolaan mutu guru, mutu alat, mutu bahan dan mutu siswa akan berkaitan satu sama lain dalam proses belajar mengajar di sekolah. Ketersediaan komponen-komponen tersebut akan menciptakan kondisi yang baik untuk Proses Belajar Mengajar (PBM) dan pada gilirannya akan berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam pencapaian prestasi belajar siswa.

Nanang Fattah (2000:130) lebih menekankan bahwa ada komponen-komponen biaya yang mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diungkapkannya:

Komponen-komponen biaya pendidikan yang mempengaruhi upaya peningkatan mutu pendidikan yaitu; gaji atau kesejahteraan guru, biaya pembinaan profesional guru, biaya pengadaan bahan pelajaran, biaya pembinaan siswa dan biaya pengelolaan sekolah

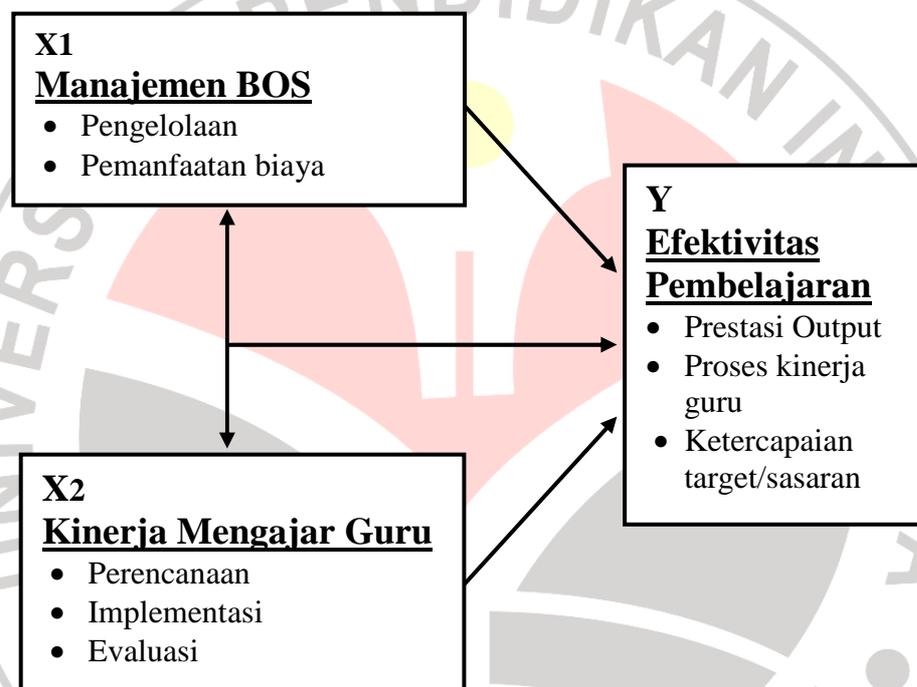
Biaya pendidikan dimaksudkan sebagai jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mencakup pembiayaan untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mencakup pembiayaan untuk keperluan akademik (PBM, media belajar, pengayaan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, evaluasi belajar) dan keperluan non akademik (pengadaan sarana, gaji atau kesejahteraan, peningkatan profesional guru, rumah tangga sekolah). Kesemuanya itu RAPBS selama satu tahun anggaran.

Pengelolaan keuangan yang efektif akan mendorong peningkatan mutu sekolah. Nanang Fattah (2000:110) menjelaskan bahwa untuk mengetahui tingkat efektivitas biaya atau analisis efektivitas biaya (*cost efectivities analysis*) didasarkan atas hasil perhitungan besarnya kontribusi komponen-komponen biaya terhadap mutu Proses Belajar Mengajar (PBM) dan hasil belajar siswa. Dimana mengukur mutu PBM menggunakan indikator-indikator 1) efisiensi waktu, 2) optimalisasi sumber belajar, 3) pelaksanaan evaluasi, dan 4) frekwensi bimbingan belajar. Sedangkan untuk mengukur mutu hasil belajar menggunakan indikator 1) UN, 2) tingkat pengulangan, 3) tingkat putus sekolah.

Selain faktor biaya, kinerja mengajar guru juga merupakan faktor penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Kinerja guru sangat terkait dengan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Tugas dan tanggung jawab guru adalah sebagai pengajar, pembimbing, dan administrator. Selain itu, tugas dan tanggung jawab guru mencakup bidang pengajaran, bimbingan, pembinaan hubungan dengan masyarakat, pengembangan kurikulum, dan pengembangan

profesi. Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan sumberdaya manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran
Kontribusi Manajemen BOS dan Kinerja Mengajar Guru Terhadap
Efektivitas Pembelajaran

F. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel-variabel penelitian ini adalah Kontribusi Manajemen BOS dan Kinerja Guru sebagai variabel bebas (*independent variable*) sedangkan Efektivitas Pembelajaran sebagai variabel terikat (*dependent variable*). Selanjutnya, dari variabel-variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut:

1. Kontribusi Manajemen Bos

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 1996:523) *kontribusi* adalah uang iuran atau kepada perkumpulan dsb: sumbangan dan *manajemen* adalah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran (KBBI 1996:623). Sedangkan *Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Namun perlu ditegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah (Depdiknas, 2007:9).

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud *Kontribusi Manajemen BOS* adalah proses penggunaan biaya berupa sumbangan dari pemerintah pusat bagi sekolah untuk biaya operasional non personil khususnya dalam rangka percepatan penuntasan wajib belajar 9 Tahun yang bermutu.

2. Kinerja Mengajar Guru

Pengertian kinerja menurut Hoy dan Miskell (1978:116) yang mengutip pendapat Vroom, menyatakan bahwa $performance = f(ability \times motivation)$. Dengan kata lain performance atau kinerja ditentukan oleh (a) kemampuan yang diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan, pengalaman dan (b) motivasi yang merupakan perhatian khusus dari hasrat seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Bernandin dan Russel yang menyatakan bahwa *kinerja* adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu atau produktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya (Sianipar, 1999:4).

Robert Kreitner dan Angelo Kinichi (1992:101) mengemukakan bahwa kinerja bergantung kepada pengaturan kemampuan (*ability*), upaya (*effort*) dan keterampilan (*skill*).

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud kinerja mengajar guru adalah kemampuan (*ability*), motivasi (*motivation*), keterampilan (*skill*), dan upaya (*effort*) yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

3. Efektivitas Pembelajaran

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator dari produktivitas. Efektivitas mengacu kepada pencapaian target secara kuantitas dan kualitas suatu sasaran program. Makin besar persentase target suatu program yang tercapai makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Efektivitas berkaitan dengan kualitas serta merupakan refleksi kemampuan untuk mempengaruhi terjadinya suatu produk. Keefektifan menunjukkan besarnya pengaruh terhadap suatu proses produksi. "*Effectiveness = quantity x quality, and if either is zero there is no effectiveness.*" (Holzer and Nagel, 1984). Jadi keefektifan suatu usaha secara implisit mengandung makna kuantitas dan kualitas.

Ahmad Sanusi (1988) dalam Sistem Manajemen Pendidikan di Indonesia, Efektivitas menekankan kepada relevansi dan adaptabilitas suatu keputusan dalam

rencana dan program terhadap dinamika nilai-nilai dalam hubungan interpersonal pegawai serta lingkungan budayanya.

Berdasarkan uraian di atas, jadi yang dimaksud *efektivitas pembelajaran* adalah pencapaian target yang relevan dan berkualitas dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Dengan demikian *efektivitas pembelajaran* merupakan refleksi kinerja profesional guru yang ditunjukkan dalam penguasaan materi ajar, metode dan teknik mengajar untuk mengembangkan interaksi dan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi hasil belajar. Dalam hal ini kualitas mengajar guru dapat pula dilihat dalam dokumen perencanaan mengajar, catatan khusus siswa bermasalah, program pengayaan, analisis hasil tes belajar, dan sistem informasi kemajuan atau prestasi belajar siswa.

G. Asumsi/Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan kumpulan dari asumsi yang dipegang bersama konsep, atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Bognaan and Biklen (1992:33) bahwa; *Paradigm is a loose collection of logically health to gether assumption, concepts or propotions the orient thinking or research.* Paradigma juga memiliki pengertian sebagai (1) suatu model dalam teori ilmu pengetahuan, dan (2) kerangka berpikir. Paradigma dalam penelitian ini, merujuk pada kerangka pemikiran yang didasarkan pada posisi masalah untuk mengarahkan penelitian.

Mutu sekolah yang baik dapat dilihat dari input dan proses pembelajaran yang efektif dan terencana dengan baik. Hal ini akan tercapai jika seluruh kegiatan

sekolah dilaksanakan dengan baik, mulai dari proses pembelajaran, pengelolaan administrasi sekolah, guru yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai, serta peserta didik yang mempunyai prestasi di sekolah dan hasil kelulusan, siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua itu dapat tercapai apabila ditunjang oleh pembiayaan pendidikan memadai dan dikelola dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka asumsi dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap sekolah khususnya di SMP Negeri selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing.
2. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah khususnya di SMP Negeri salah satunya dengan pembelajaran yang efektif.
3. Bahwa untuk tercapainya proses pembelajaran yang efektif membutuhkan manajemen biaya yang memadai dan kinerja mengajar guru yang efektif pula.

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Manajemen BOS di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dalam kualitas baik.
2. Kinerja Mengajar guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dalam kualitas baik.
3. Pembelajaran di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengkan berjalan secara efektif.

4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kontribusi Manajemen BOS terhadap Efektivitas Pembelajaran di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kontribusi Kinerja Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
6. Terdapat Pengaruh yang signifikan dari Kontribusi Manajemen BOS terhadap Kinerja Mengajar Guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.
7. Terdapat pengaruh yang signifikan dari kontribusi Manajemen BOS dan Kinerja Mengajar Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran di SMP Negeri Se-Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka.